

PENATAAN DI KAWASAN TERBAN JADI PERCONTOHAN

Konsep 'Mahanani' Solusi Atasi Permukiman Kumuh Perkotaan

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya tidak pernah berhenti melakukan inovasi pembangunan. Kini melalui konsep 'Mahanani' atau perumahan dan permukiman layak huni, harapannya mampu menjadi solusi atas penataan permukiman kumuh perkotaan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogya Umi Akhsanti, menjelaskan penataan permukiman kumuh di kawasan Terban menjadi percontohan atau pilot project dengan konsep Mahanani. "Kata Mahanani dalam Bahasa Jawa memiliki arti yang menyebabkan atau akan menjadi sebab selanjutnya. Diharapkan setelah ditata akan menjadi kampung yang lebih baik atau kampung madani," jelasnya, Jumat (17/1).

Penataan kawasan kumuh di kawasan Terban dengan konsep Mahanani meliputi area seluas sekitar dua hektare. Dibangun pada tahun lalu dan kini sudah diresmikan oleh Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sugeng Purwanto. Ada sekitar 22 Kepala Keluarga (KK) yang menempati rumah deret pertama di Kota Yogya. Selain permukiman, juga dibangun talud, saluran sanitasi hingga akses ke sungai yang menjadi halaman depan. Umi memaparkan, Mahanani tersebut tidak

sebatas mundur, munggah dan madhep kali (M3K) melainkan dibarengi dengan konsolidasi lahan. "Tidak sekadar mundur. Jadi secara prinsip ketika kemarin masyarakat punya rumah sampai bawah kemudian kita berembung dengan warga dan gambar ditata. Jadi ini support yang luar biasa," paparnya. Total anggaran untuk penataan permukiman kawasan kumuh di Terban itu mencapai sekitar Rp 13,19 miliar. Anggaran berasal dari APBD Kota Yogya

Rp 9,2 miliar dan dana alokasi khusus (DAK) dari APBN Rp 3,9 miliar. Pihaknya pun menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendukung DAK untuk pembangunan perumahan. Termasuk kepada perguruan tinggi Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) yang membantu pendampingan dalam perencanaan dan berembung dengan warga. "Kolaborasi ini cukup banyak. Kita keroyokan anggaran dengan DAK dan APBD. Kelebihan di sini tanahnya adalah Sultan Ground (SG), sehingga lebih mudah dalam penataan kawasan menjadi

lebih baik. Ini Belum selesai, di bagian bawah masih berupa tanah ini akan kita selesaikan dengan TMMD 2025," terangnya. Sementara menurut Pj Walikota Yogya Sugeng Purwanto, hasil penataan kawasan kumuh di Terban sangat luar biasa. Tidak sebanding dengan sebelumnya, dari aspek konstruksi bangunan jauh lebih aman dan nyaman. Begitu juga peran serta aktif dari masyarakat yang menempati rumah menjadi modal sosial yang sangat berharga. Tidak hanya tertata dan memberikan kenyamanan aspek lingkungan melainkan juga keamanan. "Bangunannya bagus. Tidak sekadar menjadi baik tertata

tapi punya kekuatan konstruksi yang sangat bisa diandalkan," katanya. Sugeng juga mengapresiasi semua pihak antara lain pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat sehingga penataan kawasan kumuh dapat terwujud. Terutama keikhlasan para pengguna bangunan rumah karena dengan penataan diukunya mengurugi luasan bangunan sebelumnya. Tetapi pemerintah menata dengan dibuat bangunan dua lantai sebagai kompensasi luasan bangunan saat masih satu lantai. "Marwah dari kegiatan ini yang pasti adalah penataan lingkungan. Ini juga bentuk kepedulian dari pemerintah untuk memberikan sti-

mulan bantuan berwujud perumahan yang sudah tertata yang harapannya kemudian memberikan kenyamanan bagi pemiliknya," tandasnya. Salah satu warga Terban yang rumahnya masuk penataan Hadi Wahono pun merasa senang dengan hasil penataan permukiman itu. Diakunya kini bangunan rumah lebih mundur tapi dibuat bangunan berlantai dua. Dia menempati rumah bersama istrinya dan satu cucunya. "Kami merasa senang. Rumah kami yang dulunya jelek dan kumuh, sekarang jadi rumah yang bagus. Dengan adanya rumah baru ini kami bisa bangga nggak malu dengan orang lain," ucapnya. (Dhi)-f

TAHUN LALU DAMPINGI 86 KASUS

Pemkot Gandeng 24 Lembaga Layani Bantuan Hukum Gratis

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya kembali menggulirkan layanan bantuan hukum gratis bagi warga miskin. Tahun ini terdapat 24 lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi bantuan hukum (OBH) yang digandeng.

Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setda Kota Yogya Saverius Vanny Noviantri, mengungkapkan pada tahun 2024 lalu ada 21 lembaga yang terlibat namun satu di antaranya mengundurkan diri. "Dengan adanya akreditasi terbaru dari Kemenkumham pada akhir 2024, ada empat LBH atau OBH tambahan yang kini bergabung, sehingga totalnya menjadi 24 lembaga," jelasnya, Jumat (17/1).

Pihaknya memastikan layanan ini semakin optimal dengan pola fasilitasi anggaran yang berbeda. Jika sebelumnya anggaran terbagi rata kepada seluruh lembaga, sejak tahun 2024 menggunakan sistem anggaran terbuka. Dengan begitu setiap lembaga bisa memberikan layanan selama anggaran masih tersedia, tanpa batasan

pagu individu. Langkah tersebut membuat serapan anggaran pada tahun 2024 mencapai 99,6 persen. Jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya sekitar 50 persen.

Vanny memaparkan selama tahun 2024 program bantuan hukum berhasil menangani 86 kasus. Masing-masing terdiri dari 14 kasus perdata yang mayoritas adalah perkara perceraian serta 23 kasus pidana termasuk kekerasan, penganiayaan, penipuan, penggelapan, serta pencurian. Selain itu, terdapat 49 kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang digelar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. "Layanan hukum ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Litigasi mencakup perkara yang diselesaikan melalui persidangan, seperti pidana, perdata, dan tata usaha negara. Sementara itu, nonlitigasi adalah bantuan di luar peradilan, seperti penyuluhan hukum, konsultasi, mediasi, negosiasi, dan drafting dokumen hukum," paparnya.

Menurutnya, penyuluhan hukum masih menjadi kebutuhan utama masyarakat. Oleh karena itu pada kategori nonlitigasi pemerintah fokus pada kegiatan penyuluhan hukum agar manfaat program ini dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sedangkan untuk memastikan keberlanjutan program, langkah-langkah yang dinilai efektif pada tahun lalu akan diterapkan kembali di tahun ini. Pihaknya juga menekankan tujuan utama program ini agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan mengetahui keberadaan layanan ini dan dapat mengaksesnya. "Jangan sampai anggaran sudah disediakan, tapi tidak terserap karena masyarakat tidak tahu adanya layanan ini," tambahnya.

Program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin mendapat apresiasi dalam Indonesia Bergerak, sebuah program yang menyoroti keberhasilan daerah dalam melayani masyarakat. Kota Yogya dinilai sebagai salah satu daerah yang optimal dalam mem-

berikan pelayanan bantuan hukum gratis. Sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan tersebut Pemkot Yogya diundang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Mei 2024 lalu. Dalam acara tersebut Yogya menjadi satu-satunya pemerintahan daerah se-Indonesia yang diundang untuk memaparkan program bantuan hukum. "Ini merupakan kesempatan besar bagi kami untuk menunjukkan bagaimana program ini berhasil memberikan akses keadilan kepada masyarakat, terutama yang kurang mampu," katanya.

Layanan bantuan hukum ini dapat diakses oleh masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau memiliki dokumen pendukung seperti Kartu Menuju Sehat (KMS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau surat keterangan dari pemberi bantuan hukum. Pemohon dapat menghubungi langsung LBH/OBH mitra atau melalui Bagian Hukum Setda Kota Yogya di Kompleks Balaikota. (Dhi)-f

LANAL YOGYA DAN PEMDA DIY

Siap Bersinergi Kembangkan Laut DIY

YOGYA (KR) - Danlanal Yogyakarta, Letkol Marinir Hafied Indarwan menegaskan pihaknya siap bersinergi dengan Pemda DIY untuk mengembangkan laut selatan di wilayah DIY. Beragam program kerja sama siap disusun demi kesejahteraan masyarakat DIY.

"Kedatangan kami hari ini untuk *matur* sebagai pejabat baru. Kami berterima kasih telah diberi kesempatan untuk datang, dan ini menjadi suatu kebanggaan. Tadi beliau (Sultan) juga menyampaikan bahwa beliau sangat con-

cern sekali terhadap laut kita. Beliau mengharapkan masyarakat Yogya sudah saatnya melihat ke laut," kata

Danlanal Yogyakarta, Letkol Marinir Hafied Indarwan usai bertemu dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Jumat (17/1).

Hafied mengungkapkan, selain silaturahmi pertemuan tersebut juga untuk memperkenalkan diri sebagai Danlanal Yogyakarta yang baru menggantikan Kolonel Laut Devi Erlita.

Dalam kesempatan itu dirinya sempat mendapatkan arahan agar Lanal Yogyakarta membuat program-program kelautan, baik yang berhubungan dengan perikanan maupun rencana pengembangan kawasan selatan DIY. Hal tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir pada khususnya, dan masyarakat DIY pada umumnya.

"Kami akan mencoba membuat program dan bekerja sama dengan instansi perikanan daerah. Tentunya program-program itu juga

akan melibatkan masyarakat, misalnya dalam memelihara dan mengambil hasil laut," ungkapnya.

Hafied menambahkan, Lanal Yogyakarta selama ini telah memiliki peternakan lele, yang ke depannya akan semakin dikembangkan. Pihaknya terus akan mendorong peningkatan konsumsi ikan oleh masyarakat. Salah satu contoh kegiatan yang telah dilaksanakan ialah kerja sama Lanal Yogyakarta dengan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY untuk menggelar pelatihan pengolahan ikan. (Ria)-f

WAMEN DIKDASMEN RI KUNJUNGI SMA MUHI

Sistem Pendidikan Belum Bisa Dibocorkan



Prof Atip Latipulhayat PhD (berpeci) didampingi Drs Herynugroho MPd (pakai blangkon) berdialog dengan siswa Kelas Internasional SMA Muhi.

YOGYA (KR) - Sistem Pendidikan Indonesia yang baru seperti apa belum bisa dibocorkan. "Sekarang ini mendekati final, tapi Sistem Pendidikan Indonesia yang baru seperti apa, terus terang saja belum bisa dibocorkan di sini. Semoga saja tidak muncul di Bocor Alus," kata Prof Atip Latipulhayat SH LLM PhD, Wakil Menteri (Wamen) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) RI saat Kunjungan di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta (SMA Muhi), Tegalarjo, Kota Yogyakarta, Kamis (16/1). Hadir dan menyampaikan sambutan materi Kelas Internasional oleh Drs H Herynugroho MPd (Kepala SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta), H Gita

Danu Pranata SE MM (Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah/PWM DIY). Dalam kesempatan itu Mawen Dikdasmen melakukan peninjauan serta dialog spontan dengan siswa Kelas Internasional SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.

Menurut Atip Latipulhayat, mengunjungi sekolah unggul, termasuk ke SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sebenarnya dalam upaya belajar. "Dari belajar akan menyerap banyak hal, baik pemikiran, kendala dan termasuk siswa saatnya nanti dituangkan dalam kebijakan," ucapnya terus terang. Kalau sekolah sudah baik, unggul, inovatif terus saja dilanjutkan. "Pemerintah tinggal memberi penghargaan dan

apresiasi," katanya.

Dijelaskan Atip Latipulhayat, pendidikan yang unggul, pendidikan bermutu pasti tidak lepas dari prestasi-prestasi. Untuk itulah, pendidikan yang bermutu, unggul memiliki prestasi tidak lepas dari sistem, sumber daya manusia, peserta didik/siswa. "Ini satu kesatuan yang harus dikelola secara baik dan profesional," ucapnya. Ditambahkan, selama ini ada kesan, pemerintah kurang memperhatikan sekolah swasta. "Kami nyatakan di sini, pendidikan di Indonesia, sekolah swasta memiliki peran sangat penting. Untuk sekolah swasta menjadi mitra yang perlu mendapat perhatian pemerintah pada masa-masa mendatang," tuturnya.

Sedangkan sebelumnya Drs H Herynugroho MPd dan Gita Danu Pranata SE MM dalam sambutan secara senada, mengucapkan terima kasih kepada Wamen Dikdasmen mengunjungi SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. "Kunjungan ini menjadi motivasi tersendiri untuk terus berprestasi. Seperti tagline kami, Prestasi Tiada Henti. Kami akan terus melakukan inovasi," kata Herynugroho. PWM - DIY juga mendorong SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta terus berprestasi dan menjadi sekolah unggul. "Jadi kebanggaan Muhammadiyah." harapnya. (Jay)-f

SEPANJANG TAHUN 2024 ADA 18 KEJADIAN

Potensi Talut Longsor Harus Tetap Diwaspadai

YOGYA (KR) - Curah hujan yang masih tinggi harus tetap menjadi kewaspadaan masyarakat atas berbagai potensi bencana. Salah satunya berupa talut longsor yang potensinya juga tinggi.

Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogya Darmanto, menjelaskan sepanjang tahun 2024 lalu tercatat sebanyak 18 kejadian talut longsor di wilayah Kota Yogya. "Kemarin pada Minggu (12/1) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB terjadi talut longsor di wilayah Gedongkiwo Mantrijeron. Saat kejadian memang tengah terjadi hujan deras," jelasnya, Rabu (15/1).

Cuaca ekstrem seperti hujan deras menjadi salah satu penyebab utama terjadinya talut longsor. BPBD Kota Yogya juga sudah memberikan imbauan terutama bagi masyarakat yang berada di area rawan agar lebih waspada dan selalu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Sebagai langkah pencegahan telah diterbitkan Surat Edaran (SE) pada November 2024 yang berisi panduan kesiapsiagaan menghadapi potensi longsor.

Darmanto menegaskan dalam penanganan talut yang longsor, BPBD hanya dapat memberikan bantuan darurat berupa kebutuhan makanan dan terpal untuk kondisi darurat. Sementara untuk perbaikan infrastruktur talut yang longsor hal tersebut menjadi kewenangan Dinas Pe-

kerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogya. Dirinya pun berharap masyarakat terus memantau kondisi cuaca dan melaporkan setiap tanda-tanda kerawanan kepada pihak berwenang untuk menghindari dampak yang lebih besar. "Kami berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi lintas perangkat daerah guna meminimalkan risiko bencana khususnya di wilayah Kota Yogya," tandasnya.

Mantri Pamong Praja Kemantren Mantrijeron Affrio Sunarno, mengapresiasi langkah sigap yang dilakukan oleh BPBD Kota Yogya atas kejadian bencana di wilayah Gedongkiwo. Pada saat kejadian Dinas Sosial DIY dan BPBD Kota Yogya telah menyalurkan bantuan awal berupa makanan dan terpal untuk membantu warga yang terdampak. Menurutnya talut longsor yang menimpa wilayahnya menyebabkan kerusakan pada dapur milik salah satu warga. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. "Ada dua kepala keluarga (KK) dengan total tujuh jiwa yang terdampak akibat insiden ini. Namun kondisi mereka saat ini aman dan tidak memerlukan evakuasi atau mengungsi," katanya.

Sejak kejadian tersebut, pihaknya masih berkoordinasi dengan Ketua RW setempat untuk mempercepat proses administrasi terkait status lahan. Ia berharap, proses verifikasi dan bantuan dapat berjalan dengan lancar, sehingga warga terdampak dapat segera mendapatkan solusi untuk memperbaiki kondisi hunian mereka. (Dhi)-f

RAKERWIL LAZISMU DIY 2025

Sinergi Kebaikan untuk Inovasi Sosial



KR-Devid Permana
Peluncuran program Kampung Berkemajuan saat pembukaan Rakerwil Lazismu DIY.

YOGYA (KR) - Lazismu DIY menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) tahun 2025 di Hotel UNY Yogyakarta, 17-18 Januari 2025, diikuti seluruh perwakilan Lazismu se DIY. Rakerwil mengusung tema besar "Sinergi Kebaikan untuk Inovasi Sosial dan Pencapaian SDGs".

Ketua Lazismu DIY, Jefree Fahana menuturkan, kebijakan yang dihasilkan dalam rakerwil akan memproyeksikan Lazismu DIY di sepanjang tahun 2025. "Mari bersama-sama merumuskan program yang baik dan merealisasikannya agar 2025 menjadi lebih baik lagi," kata Jefree saat acara pembukaan rakerwil, Jumat (17/1).

Disela pembukaan rakerwil dilakukan sosialisasi Jalankebaikan.id, sebuah platform crowdfunding yang dirancang untuk memudahkan masyarakat menyalurkan donasi dan berpartisipasi dalam berbagai program sosial. Selain itu dilakukan peluncuran program 'Kampung Berkemajuan' sebagai program prioritas Lazismu DIY di tahun 2025.

Tak ketinggalan, pengumuman Lazismu Award 2024 oleh Alfis Khoirul selaku Wakil Sekretaris Lazismu DIY. Penghargaan ini diberikan kepada individu maupun organisasi yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam mendukung misi sosial Lazismu.

Ketua Lazismu Pusat, Ahmad Imam Mujadid Rais menekankan pentingnya inovasi sosial yang berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor. "Semoga Rakerwil 2025 Lazismu DIY dapat menghasilkan program yang komprehensif dan selaras dengan keraknas Lazismu untuk kebermanfaatannya yang lebih luas bagi umat dan bangsa," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY Muhammad Ikhwan Ahada yang membuka secara resmi rakerwil menegaskan pentingnya kolaborasi dan konsistensi dalam menjalankan program-program kerja Lazismu. "Lazismu DIY harus menjadi inspirasi bagi Lazismu lain dan meningkatkan apa yang sudah dicapainya sebagai sebuah prestasi," tegasnya. (Dev)-f